KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK									
			H.1	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 1 3 9				Final	
			H.2	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
					22 000				
A.2 N	A.2 NIK : [
A.3 N	A.3 Nama : LENI PRIYANTI								
B. PP	h PASAL 21	YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
	B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
	3	21-402-01		872.300	872.300	0	5	43.615	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota									
B.8	.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022								
	Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
	Nomor : Tanggal dd mm yyyy								
B.10	3.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11	B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDE	ENTITAS PE	MOTONG PAJAK							
C.1									
C.2	C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
C.3									
C.4				$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					
C.5	Nama Penandatangan : HARI JUMADI								
C.6	Pernyataan \	Wajib Pajak :		n ini saya menyatakan ba angani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	tan Unifikasi telah sa	ya isi dengan	benar dan telah saya	
		在32.0 第2.5 2.5 2.6		i dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	l berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	t mengatur bahwa do	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	

QMRXL7J3